



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

# ***LAKIP 2021***

**(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang merupakan unsur pelaksana Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tanggal 21 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan kemitraan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **B. STRUKTUR ORGANISASI**

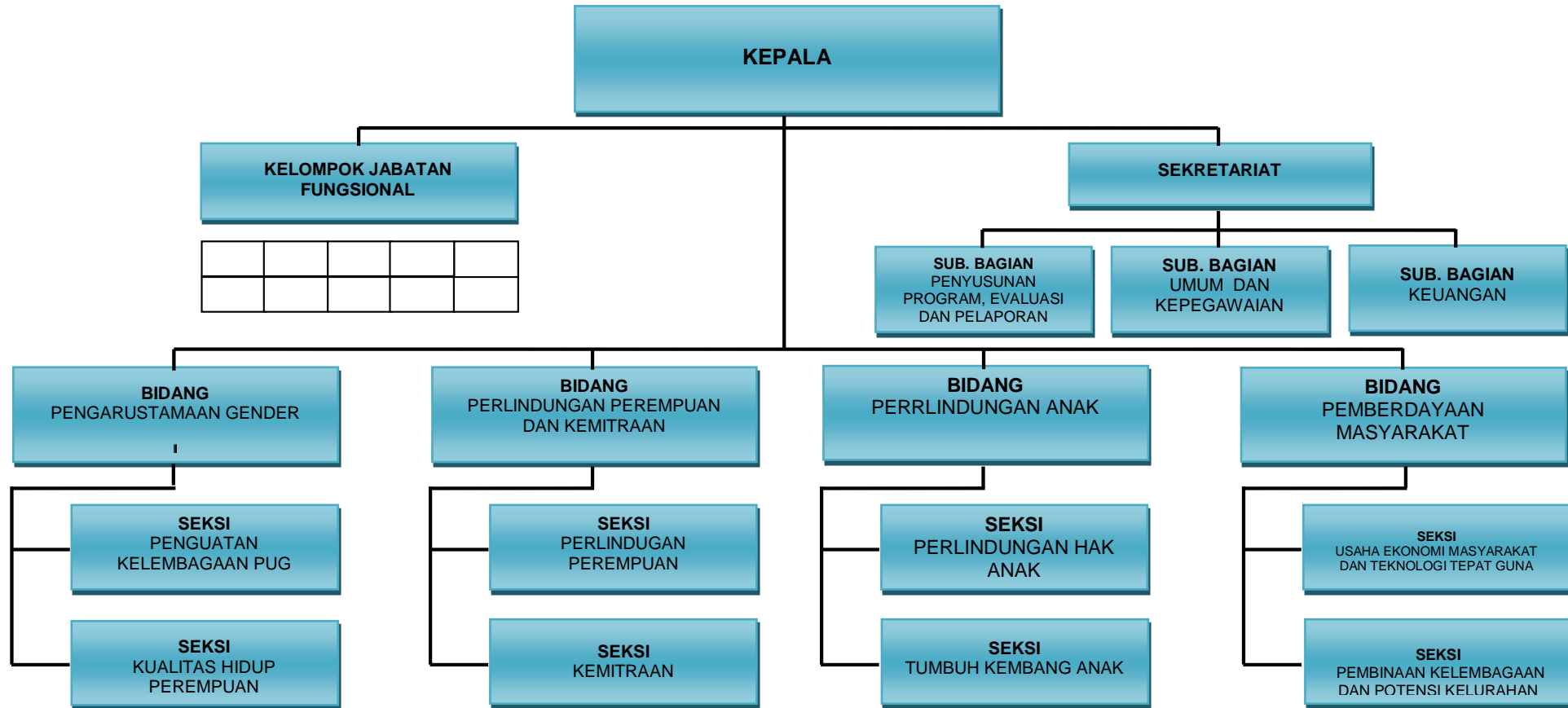
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 14); dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 57 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi;

- a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pengarusutamaan Gender, membawahi ;
    - a. Seksi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
    - b. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
  4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Kemitraan, membawahi ;
    - a. Seksi Perlindungan Perempuan
    - b. Seksi Kemitraan
  5. Bidang Perlindungan Anak, membawahi ;
    - a. Seksi Perlindungan Hak Anak
    - b. Seksi Tumbuh Kembang Anak
  6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
    - a. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
    - b. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Potensi Kelurahan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada gambar berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK**  
**DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG**



Secara keseluruhan komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

**Tabel. 1**  
**Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Jabatan**

No.	Jumlah					Eselon				Pejabat	
	Ka.Skpd	Sekretaris	Sub.Bagian	Bidang	Seksi	i	ii	iii	iv	Struktural	Fungsional
						(Org)	(Org)	(Org)	(Org)	(Org)	(Org)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	1	1	3	4	7	-	1	5	10	16	-

**Tabel. 2**  
**Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan & Golongan Kepangkatan**

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Personil	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Personil	Pangkat Golongan	Jumlah Personil
	Skpd	(Org)		(Org)		(Org)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pegawai Pegeri Sipil	30	S2	4	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
			S1	15	Pembina Tk.I (IV/b)	1
			D3	3	Pembina (IV/a)	5
			SMA	8	Pembina Tk. I (III/d)	9
					Penata (III/c)	3
					Penata Muda Tk.I (III/b)	4
					Penata Muda (III/a)	1
					Pengatur Tk.I (II/d)	5
					Pengatur (II/c)	1
					Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-
					Pengatur Muda (II/a)	-
					CPNS	-
2	Honorer / Petugas P2TP2A	22	S1	8		
			D3	2		
			SMA	12		

### C. SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang didukung sarana dan prasarana, sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel. 3**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran**

<b>No.</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>
1	Mobil Dinas	1 Unit
2	Mobil Pick Up	1 Unit
3	Mobil P2TP2A	1 Unit
4	Motor Dinas	7 Unit
5	Plang DP3APM	1 Buah
6	Plang Sekre P2TP2A	1 Buah
7	Plang Sekre PUG	1 Buah
8	Plang DPW	1 Buah
9	AC	14 Buah
10	Bantal	1 Buah
11	Banner	2 Buah
12	Brangkas	11 Buah
13	Baliho	1 Buah
14	Cermin	1 Buah
15	Karpet Bulu	1 Buah
16	Kasur	1 Buah
17	Tempat Tidur	1 Buah
18	Kamera	2 Buah
19	Dispenser	4 Buah
20	Handphone	1 Buah
21	Meja Rapat	1 Buah
22	Meja Komputer	3 Buah
23	Meja Kerja	10 Buah
24	Meja 1 Biro	1 Buah
25	Meja ½ Biro	30 Buah
26	Meja Tamu	1 Buah
27	Meja (Coklat)	1 Buah
28	Meja	1 Buah
29	Laci Meja	3 Buah
30	Rak	1 Buah

31	Rak Penyimpanan	1 Buah
32	Etalase	2 Buah
33	Sofa	3 Set
34	Sound System	1 Buah
35	Kursi Sofa	1 Buah
36	Whiteboard Organisasi	1 Buah
37	Whiteboard	1 Buah
38	Finger print	1 Buah
39	Filing Besi	13 Buah
40	Filing Cabinet	1 Buah
41	Gambar Burung Garuda	1 Buah
42	Gambar Walikota dan Wakil Walikota	
43	Galon Air	2 Buah
44	Gordin	2 Buah
45	Gorden Jendela	6 Buah
46	Gorden Pintu	2 Buah
47	Handycam	1 Buah
48	Keranjang Buah	1 Buah
49	Kotak Obat	1 Buah
50	Kulkas	1 Buah
51	Kipas	1 Buah
52	Kipas Angin	2 buah
53	Almari	2 Buah
54	Almari Rendah	1 Buah
55	Almari Kaca	8Buah
56	Almari Besi	3 Buah
57	Almari Perpustakaan	2 Buah
58	Papan Pengumuman	3 Buah
59	Papan Informasi	1 Buah
60	Partisi	1 Buah
61	Permainan Anak	1 Paket
62	Pengharum Ruangan	1 Buah



63	CCTV	1 Buah
64	Jam Dinding	4 Buah
65	CPU	1 Buah
66	Layar Infocus	2 Buah
67	Mesin Shereder	1 Buah
68	Mesin Jahit	1 Buah
69	Mesin Fotocopy Mini	1 Buah
70	Mesin FAX	1 Buah
71	Mesin Tik	2 Buah
72	Kursi	4 Buah
73	Kursi Plastik	50 Buah
74	Kursi Lipat	1 Buah
75	Kursi Futura	4 Buah
76	Kursi Kerja	7 Buah
77	Kursi Rapat	37 Buah
78	Kursi Tamu	2 Buah
79	Kursi Putar Sandaran	1 Buah
80	Kursi Putar Sandaran Tinggi	2 Buah
81	Kursi Putar Sandaran Rendah	2 Buah
82	Kursi Putar	8 Buah
83	Kursi Putar (Biru)	8 Buah
84	Kursi Putar (Coklat)	1 Buah
85	Kursi Putar (Hitam)	3 Buah
86	Lemari	1 Buah
87	Lemari Besi	1 Buah
88	Lemari Kaca	1 Buah
89	Lemari Kayu	3 Buah
90	Lemari Gantung	3 Buah
91	Lemari Laci Kayu	1 Buah
92	Lemari Kayu Rendah	2 Buah
93	LCD - Layer	1 Buah
94	Infocus	1 Buah

95	Layar Infokus	1 Buah
96	Personal Computer (PC)	33 Buah
97	Laptop	17 Buah
98	Televisi	4 Buah
99	Tempat Sampah	2 Buah
100	Tempat Tisu	2 Buah
101	UPS	8 Buah
102	USB HUB	1 Buah
103	Printer	38 Buah
104	Lemari Es Mini	1 Buah

**BAB II**  
**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

**A. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dibuatnya dokumen rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program, sasaran, dan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2021 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capainya merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang. Disamping itu Dokumen Rencana Kinerja memuat juga informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capainya. Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 5**  
**Formulir Rencana Kinerja Tahunan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan**  
**Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kelembagaan PUG dan PHA Aktif	100 %
		Rasio Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO	22 Per 1000 Perempuan
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Tertangani Sesuai Dengan Standar	100 %
		Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan ( Umur 15-64 Tahun ) Mengalami Kekerasan ( Fisik, Seksual, atau Emosional ) Oleh Pasangan Atau Mantan Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir	0,03 %
		Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan ( 15-64 Tahun ) Mengalami Kekerasan	0,02 %

		Seksual Oleh Orang Lain Selain Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir	
		Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun dan Sebelum Umur 18 Tahun	40 %
		Persentase Perangkat Daerah Melaksanakan PPRG	100 %
		Persentase ARG Dalam Belanja Langsung APBD	2,50 %
		Persentase Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah	50 %
		Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR	30 %
		Skor Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	700-800 Skor
		Rasio Anak Korban Kekerasan	5,51 Per 1000 Anak
		Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Tertangani Sesuai Dengan Standar ( Komprehensif )	100 %
		Persentase Kecamatan Memiliki Posyantek	75 %
		Jumlah Inovasi Teknologi Tepat Guna	15 TTG
		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) Aktif	94,44 %
		Rata – rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	100 %
		Persentase PKK Aktif	100 %
		Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	90 %
		Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	90 %

## B. PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mengimplementasikan rencana tujuan dan target pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang diatas dan sebagai acuan pelaksanaan aktifitas serta interaksi dalam program-program, maka program dan kegiatan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel adalah sebagai berikut:

**Tabel. 6**  
**Program dan Kegiatan**

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
		2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
				2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		2	Penguatan dan Pengembangan	1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga

			Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam		Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		3	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
				2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
7	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

8	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan
				2	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Tabel. 7

Formulir Penetapan Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan  
Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>MENINGKAT NYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
			<b>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	
	Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.114.200
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
	Meningkatnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.792.505.174



			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
	Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
	Meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.161.400
	Meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	320.415.540
	Meningkatnya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.048.200
	Meningkatnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.920.000
	Meningkatnya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.952.700
	Meningkatnya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.110.000
	Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.448.500

			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Meningkatnya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.865.000
	Meningkatnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.999.800
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Meningkatnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.197.000
	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	720.682.400
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.500.000
	Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.609.000

	Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.648.000
	Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.300.000
<b>MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	
			<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
	Meningkatnya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	137.151.151
			<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
	Meningkatnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	160.026.600
<b>MENINGKATNYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	

			<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	22.080.000
	Meningkatnya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	330.991.001
			<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0
	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	244.609.000

	Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
			<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Meningkatnya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	543.190.450
<b>MENINGKATNYA PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	
			<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Meningkatnya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0
			<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	

	Meningkatnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	412.794.432
			<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Meningkatnya Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	53.954.018
<b>MENINGKAT NYA PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	
			<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
	Meningkatnya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	181.889.128

	Kabupaten/Kota			
	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	79.381.730
			<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
	Meningkatnya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	165.692.282
<b>MENINGKATNYA PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	
			<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	28.399.000
			<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat</b>	

			<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	224.798.000
<b>MENINGKAT NYA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	
			<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	
	Meningkatnya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	108.575.380
<b>MENINGKAT NYA PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	
			<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum</b>	



			<b>Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Meningkatnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0

Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja kegiatan maka dipergunakan skala ordinal dan makna dari nilai tersebut yaitu :

- 80 – 100 : Baik  
60 – 70 : Cukup Baik  
< 60 : Kurang Baik

Hasil perhitungan pengukuran capaian kinerja, yaitu **Indikator kinerja Utama** pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel :

**Tabel. 8**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Keterangan</b>
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Rasio Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO dibagi Jumlah Perempuan dikali 1000
	2. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Tertangani Sesuai Dengan Standar	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani Sesuai Dengan Standar Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dikali 100
	3. Persentase Perangkat Daerah Melaksanakan PPRG	Jumlah Perangkat Daerah Melaksanakan PPRG dibagi Perangkat Daerah dikali 100

	4. Persentase ARG Dalam Belanja Langsung APBD	Jumlah ARG dibagi Jumlah Belanja Langsung APBD dikali 100
	5. Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR	Jumlah Kursi DPRD Yang diduduki Perempuan dibagi Jumlah Total Kursi di Keanggotaan DPRD dikali 100
	6. Skor Capaian Kabupaten / Kota Layak Anak	Skor Capaian Kabupaten / Kota Layak Anak
	7. Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Tertangani Sesuai Dengan Standar ( Komprehensif )	Jumlah Anak Korban Kekerasan Yang Tertangani Sesuai Dengan Standar ( Komprehensif ) dibagi Jumlah Anak Korban Kekerasan dikali 100
	8. Persentase Kecamatan Memiliki Posyantek	Jumlah Kecamatan Memiliki Posyantek dibagi Jumlah Kecamatan dikali 100
	9. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) Aktif	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) Yang Aktif dibagi Jumlah LPM dikali 100

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas capaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2021 dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 9**  
**Hasil Pengukuran Kinerja**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan**  
**Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kelembagaan PUG dan PHA Aktif	100 %	100 %	100 %
Rasio Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO		22 Per 1000 Perempuan	42,50 Per 1000 Perempuan	6,82 %	
Persentase Perempuan Korban		100 %	100 %		

	Kekerasan Yang Tertangani Sesuai Dengan Standar			100 %
	Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan ( Umur 15-64 Tahun ) Mengalami Kekerasan ( Fisik,Seksual,atau Emosional ) Oleh Pasangan Atau Mantan Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir	0,03 %	0,4 %	198,67%
	Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan ( 15-64 Tahun ) Mengalami Kekerasan Seksual Oleh Orang Lain Selain Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir	0,02 %	0,0001 %	199,50%
	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun dan Sebelum Umur 18 Tahun	40 %	0,07 %	199,83 %
	Persentase Perangkat Daerah Melaksanakan PPRG	100 %	100 %	100 %
	Persentase ARG Dalam Belanja Langsung APBD	2,50 %	4,74 %	189,60 %
	Persentase Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah	50 %	58 %	116 %
	Proporsi Kursi Yang Diduduki	30 %	37 %	123,33 %

Perempuan di DPR			
Skor Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	700-800 Skor	600-700 Skor	100 %
Rasio Anak Korban Kekerasan	5,44 Per 1000 Anak	1,08 Per 1000 Anak	87,5 %
Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Tertangani Sesuai Dengan Standar (Komprenhensif)	100 %	100 %	100 %
Persentase Kecamatan Memiliki Posyantek	75,00%	25 %	33,33 %
Jumlah Inovasi Teknologi Tepat Guna	15 TTG	15 TTG	100 %
Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Aktif	94,44 %	100 %	105,89 %
Rata – rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	100 %	100 %	100 %
Persentase PKK Aktif	100 %	100 %	100 %
Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	90 %	90 %	100 %
Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	90 %	90 %	100 %

### BAB III

#### A. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tujuan organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

#### B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok : masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk : %, orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (revisi) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023, Tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, dituangkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2021.

Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja kegiatan maka dipergunakan skala ordinal dan makna dari nilai tersebut yaitu:

80 - 100	: Baik
60 - 79	: Cukup Baik
< 60	: Kurang Baik

Hasil perhitungan pengukuran capaian kinerja, yaitu **Indikator Kinerja Utama** pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 10**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Keterangan (3)
Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Rasio Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO dibagi Jumlah Perempuan dikali 1000
	2. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Tertangani Sesuai Dengan Standar	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani Sesuai Dengan Standar Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dikali 100

	3. Persentase Perangkat Daerah Melaksanakan PPRG	Jumlah Perangkat Daerah Melaksanakan PPRG dibagi Perangkat Daerah dikali 100
	4. Persentase ARG Dalam Belanja Langsung APBD	Jumlah ARG dibagi Jumlah Belanja Langsung APBD dikali 100
	5. Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR	Jumlah Kursi DPRD Yang diduduki Perempuan dibagi Jumlah Total Kursi di Keanggotaan DPRD dikali 100
	6. Skor Capaian Kabupaten / Kota Layak Anak	Skor Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak
	7. Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Tertangani Sesuai Dengan Standar (Komprehensif)	Jumlah Anak Korban Kekerasan Yang Tertangani Sesuai Dengan Standar (Komprehensif) dibagi Jumlah Anak Korban Kekerasan dikali 100
	8. Persentase Kecamatan Memiliki Posyantek	Jumlah Kecamatan Memiliki Posyantek dibagi Jumlah Kecamatan dikali 100
	9. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Aktif	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Yang Aktif dibagi Jumlah LPM dikali 100

### **C. PENGUATAN KELEMBAGAAN**

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak
2. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan
3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya
4. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan
5. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan
6. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak
7. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

### **D. KLASTER HAK ANAK**

1. Hak sipil dan kebebasan
  - a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
  - b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan

- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
  - a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
  - b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
  - c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - a. angka Kematian Bayi;
  - b. prevalensi kekurangan gizi pada balita
  - c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif
  - d. jumlah Pojok ASI
  - e. persentase imunisasi dasar lengkap
  - f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental
  - g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan
  - h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih
  - i. tersedia kawasan tanpa rokok.
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
  - a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini
  - b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun
  - c. persentase sekolah ramah anak
  - d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
  - e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
5. Perlindungan khusus.
  - a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan
  - b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)
  - c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak
  - d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.
6. Ada 4 (empat) kategori Penghargaan Kota Layak Anak:
  - a. Kategori Pratama
  - b. Kategori Madya
  - c. Kategori Nindya
  - d. Kategori Utama

## E. ANALISIS LAPORAN KINERJA REALISASI KEUANGAN DAN FISIK

Tabel. 11  
Realisasi Anggaran

No	Kegiatan	Target	Pagu Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%	
						Keu.	Fisik
1.	Belanja	100	9.406.979.486	8.840.374.889	566.604.597	93,98	100

Berdasarkan realisasi keuangan dan fisik pada tabel di atas dapat diketahui bahwa semua realisasi keuangan dan fisik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang sudah tercapai dengan **Baik**. Adapun Analisis terhadap belanja tersebut dapat dilihat pada keterangan dibawah ini:

### 1. Realisasi Belanja

Realisasi **Belanja** Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang sebesar Rp. 8.840.374.889,- atau sebesar 93,98% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 9.406.979.486,- Berdasarkan perhitungan terhadap **Realisasi Belanja** Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang dapat dikatakan **Baik**.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2021 diharapkan mampu menunjang suksesnya penyelenggaraan pembangunan Kota Tanjungpinang dengan adanya koreksi yang konstruktif dari pihak terkait sehingga adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sasaran program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang untuk dapat melaksanakan kegiatan acara terarah melalui program pembangunan yang jelas serta menetapkan kebijakan yang tepat dengan didukung oleh sumber dana dan sumber daya manusia yang berpengetahuan, berkemampuan serta menguasai teknologi.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2021 rata-rata capaian kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2021 ini kami buat sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

Tanjungpinang,     Januari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

RUSTAM,SKM,M.Si  
NIP. 196704011991011001